

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semangat reformasi birokrasi diartikan sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari *Good Governance* secara konsisten. Akuntabilitas dicapai dengan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang pelaksanaan pengawasan keuangan daerah melalui unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah.

Sistem penganggaran merupakan setiap pengeluaran anggaran memiliki acuan yang jelas dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai mata uang yang muncul. Selanjutnya sistem pengendalian dibutuhkan untuk proses perencanaan dan penganggaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Untuk itu suatu sistem dibutuhkan agar memberi keyakinan memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah sehingga bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien,

melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset daerah, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per.Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan rencana anggaran kegiatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas/Unit kerja yang berada dalam kewenangan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 tahun.

Dokumen RKA yang dibuat oleh setiap Unit kerja dievaluasi sebagai bahan asistensi oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif untuk selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu SKPD yang terlibat dalam pembuatan Dokumen RKA tersebut. Anggaran yang baik adalah anggaran yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Anggaran ideal merupakan anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai, sehingga akan selalu terjadi kemajuan dalam pembangunan masyarakat. Penekanan anggaran (*budget emphasis*) dalam Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang dapat memungkinkan untuk memicu terjadinya senjangan anggaran. Apabila

beban daerah terlalu tinggi sedangkan pendapatannya hanya biasa-biasa saja maka kemungkinan terjadinya senjangan menjadi sangat tinggi.

Salah satu alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan adalah berapa besarnya kemampuan anggaran yang diserap sesuai dengan perencanaan di dalam APBD. Tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah dapat dilihat dari daya serap suatu anggaran dan bisa melihat gambaran kualitas perencanaan pembangunan di daerah.

Anggaran sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian dalam mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah dan mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah instansi yang melaksanakan tugas-tugas otonomi di bidang kepegawaian yang memiliki visi misi yang selaras dengan visi misi daerah dengan pelaksanaan program-program kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta dilaporkan dalam laporan keuangan SKPD yang handal dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaan program-program kegiatannya masih terdapat penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN ANGGARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG”**.

## **1.2 BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan supaya penelitian ini fokus pada permasalahan. Penelitian ini akan memfokuskan pada sistem pengendalian intern anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sehingga menghasilkan informasi yang tepat guna, sasaran dan waktu.

## **1.3 PERUMUSAN MASALAH**

Pada umumnya setiap perusahaan maupun instansi dalam melakukan kegiatannya selalu menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Dalam pembahasan ini, maka pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah : **“Bagaimanakah sistem pengendalian intern anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang”**

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang.

#### **1.5 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

##### **1) Manfaat teoritis**

###### **a. Bagi kalangan akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

###### **b. Bagi penelitian selanjutnya**

Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi, acuan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk penulisan karya ilmiah dan penelitian lebih lanjut yang membahas hal sejenis.

##### **2) Manfaat praktis**

###### **a. Bagi pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak unit kerja yang diteliti serta sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan guna meningkatkan kinerja dalam proses pengendalian intern.

b. Bagi Peneliti

Agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Anggaran yang ada dalam instansi sehingga dapat menambah wawasan serta melatih peneliti dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

c. Bagi Pembaca Umum

Sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang Pengendalian Intern Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

